

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAMBI



RENCANA KERJA
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia-Nya sehingga penyusunan Rancangan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Rancangan Rencana Kinerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 ini memuat program kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2020, program kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2021 serta Rencana Kerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 mendatang dengan mengakomodir kebutuhan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait lingkup Provinsi Jambi Sehingga dapat menunjang Pembangunan Daerah Provinsi Jambi sesuai yang tertuang dalam RPJMD serta menjadi pedoman perangkat daerah maupun *stakeholder* yang membutuhkan.

Demikian, semoga Rancangan Rencana Kerja ini dapat memberikan dukungan terhadap Peran dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi, terima kasih.

Jambi, Januari 2025
KEPALA BADAN

AGUS PIRNGADI, S.Sos
Pembina Utama Madya
Nip. 196912151990031005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Landasan Hukum.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU	1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Renstra.....	1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.....	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi	28
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	29
3.1 Telaah Terhadap kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan sasaran.....	31
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	38
BAB V PENUTUP	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Program dan Kegiatan	1
Tabel 2. 2 Realisasi Belanja Daerah.....	4
Tabel 2. 3 Capaian Indikator Utama	20
Tabel 2. 4 Kategori Mutu Pelayanan.....	22
Tabel 2. 5 Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	23
Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Sakip Tahun 2020-2022.....	23
Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Opini BPK Tahun 2020-2022	24
Tabel 2. 8 IKM Tahun 2023	26
Tabel 3. 1 Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran.....	32
Tabel 3. 2 Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran.....	33
Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Tahun Anggaran 2025	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang disusun oleh perangkat Daerah yang berisi lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Program dan kegiatan pembangunan daerah harus diarahkan untuk mempercepat proses pembangunan, mempercepat peningkatan kecerdasan dan kemampuan bangsa, meningkatkan produktifitas dan efisiensi, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memelihara dan meningkatkan kualitas hidup.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan .Perencanaan merupakan penentuan tujuan yang ingin di capai . Dengan kata lain Perencanaan adalah suatu konsep dinamis dan fleksibel tentang persoalan masa depan, yang intinya memuat beberapa pilihan atau alternative program prioritas, optimalisasi alokasi sumberdaya yang tersedia dan efesiensi.

Dalam suatu progres kegiatan pencapaian tujuan yang telah di tentukan, dapat mencapai hasil yang berdaya guna dan berhasil guna, apabila fungsi-fungsi dari management seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perencanaan sebagai salah satu dari fungsi management memiliki fungsi yang sama strategis nya dibandingkan dengan fungsi-fungsi management yang lainnya. Karena Perencanaan dapat di jadikan sebagai alat yang tepat untuk mengendalikan pelaksanaan suatu kegiatan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Oleh karena itu perencanaan suatu kegiatan menjadi sangat penting, karena kita dihadapkan pada suatu kondisi dimana kebutuhan yang di inginkan tidak terbatas, sementara sumber daya yang ada (sumber daya

alam, sumber daya buatan dan SDM) terbatas, sehingga kita harus memilih beberapa alternative dan skala prioritas. Bila kita dihadapkan dengan kondisi yang demikian itu, maka perencanaan mutlak untuk dijadikan sebagai bahan mencapai tujuan. Ada 3 (tiga) ciri-ciri perencanaan yang baik yaitu :

1. Perencanaan harus bersifat rasional, yaitu perencanaan dibuat berdasarkan pemikiran dan perhitungan secara cermat, logis dan dapat di operasionalkan.
2. Perencanaan bersifat fleksibel, berarti luwes, dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan apapun dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi.
3. Perencanaan bersifat kontinyu, artinya perencanaan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, baik dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Untuk mewujudkan realita pembangunan yang terarah, tepat sasaran, rasional, akomodatif, berdaya guna dan berhasil guna serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat/anggota, maka perlu diadakan perencanaan yang di mulai dari bawah (bottom up) atau dikenal dengan perencanaan partisipatif yaitu perencanaan dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Sehingga hasil pembangunan yang kita laksanakan dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat banyak dan anggota organisasi.

Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) sangat dibutuhkan dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan seluruh stakeholders. Oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai salah satu stakeholder kunci perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi melalui proses dan tahapan (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan rancangan awal; (3) Penyusunan rancangan; (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah; (5) Perumusan rancangan akhir; dan (6) Penetapan. Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan, proses top-down dan proses bottom-up secara berjenjang dan selanjutnya disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten, Provinsi maupun Nasional sesuai dengan kewenangannya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai pedoman dan rumusan dalam menentukan arah kebijakan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan Visi dan Misi dalam menunjang program pembangunan Kepala Daerah sehingga terjadi Sinergisitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan sehingga tercapai hasil yang terukur sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi dengan menggunakan sumber daya dan kemampuan yang ada .

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 tahun 2009 tentang RPJP 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2025 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penyusunan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi
- 2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD Provinsi Jambi

Bab III Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2026



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Lampiran

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun lalu diperlukan sebagai bahan penyusunan Renja tahun 2026. Dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan tahun lalu, sebagian besar sudah dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan, adapun program kerja dan kegiatan yang terdapat di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi untuk tahun Anggaran 2026 melaksanakan **4 program, 16 Kegiatan dan 55 Subkegiatan** untuk memenuhi **sasaran stratejik**. Antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
2. Program Pengelelolaan Keuangan
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pendapatan Daerah

Untuk melaksanakan semua program, subkegiatan dan kegiatan disediakan anggaran sebesar Rp. **1.043.913.923.445,-** yang terdiri dari :

Tabel 2. 1 Program dan Kegiatan

Nama Program	Pagu Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 92.586.563.667,-
Program Pengelelolaan Keuangan	Rp. 1.083.218.131.244,-
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 14.655.505.531,-
Program Pendapatan Daerah	Rp. 3.094.945.706,-
Jumlah.....	Rp. 1.193.555.146.148,-

Dengan realisasi **Rp. 11.86.215.963.766,-** atau sebesar **96,14%**.

Sasaran pembangunan yang berhasil dicapai adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
3. Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Meningkatnya pendapatan daerah;

Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi terdapat 4 (empat) program pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Selama tahun 2023 telah diupayakan pelaksanaan program tersebut.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian program dan kegiatan 96,14 % dalam arti semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan .

Adapun tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tujuan Strategis

1. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan daerah yang bersih, baik dan berwibawa;
2. Meningkatkan tata Kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
3. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah;

Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
3. Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Meningkatnya pendapatan daerah;



Dari seluruh Program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2023 , berdasarkan hasil evaluasi kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, program dan kegiatan tersebut terlihat dan tergambar dalam table 2.1, sedangkan realisasi Belanja Daerah tergambar pada table 2.2 berikut :



Tabel 2. 2 Realisasi Belanja Daerah

LAPORAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA, KEUANGAN DAN KEBIJAKAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Periode	: 2023										
Nama Perangkat Daerah	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Perangkat Daerah										
No	Uraian	Jumlah Pagu Anggaran	Target Anggaran Triwulan IV	Realisasi Keuangan		Target Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja		Masalah / Kendala	Solusi Kebijakan
				S/d Desember	%	Jumlah	Satuan	s/d Desember	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	92.586.563.667	92.173.590.557	91.272.962.253	98,58	BB	Predikat				
	Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.094.479.067	1.094.479.067	1.071.122.860	97,87	9	Dokumen	9	100,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	277.977.356	277.977.356	273.533.221	98,40	4	Dokumen	4	100,00	Tidak ada Kendala	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	816.501.711	816.501.711	797.589.639	97,68	5	Dokumen	5	100,00	Tidak ada Kendala	
	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.872.497.510	79.872.497.510	78.959.412.565	98,86	12	Bulan	12	100,00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	78.812.403.510	78.812.403.510	77.907.248.107	98,85	3708	orang	3708	100,00	Tidak ada Kendala	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	987.539.600	987.539.600	979.639.783	99,20	4	Dokumen	4	100,00	Tidak ada Kendala	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	72.554.400	72.554.400	72.524.675	99,96	1	Dokumen	1	100,00	Tidak ada Kendala	



Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	250.207.820	250.207.820	232.545.040	92,94	100	%	100	100,00	Tidak ada Kendala	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	250.207.820	250.207.820	232.545.040	92,94	4	Dokumen	4	100,00	Tidak ada Kendala	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	607.237.110	194.264.000	547.231.789	90,12	100	%	100	100,00	Tidak ada Kendala	
Pengadaan pakaian Dinas	262.128.000	262.128.000	253.921.000	96,87	1	Paket	1	100,00	Tidak ada Kendala	
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	150.845.110	150.845.110	149.800.774	99,31	4	Dokumen	4	100,00	Tidak ada Kendala	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	194.264.000	194.264.000	143.510.015	73,87	30	orang	30	100,00	Tidak ada Kendala	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.741.468.711	2.741.468.711	2.675.399.296	97,59	100	%	100	100,00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	128.744.695	128.744.695	114.747.114	89,13	1	Paket	1	100,00	Tidak ada Kendala	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	310.536.600	310.536.600	305.347.418	98,33	1	Paket	1	100,00	Tidak ada Kendala	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.777.126.336	1.777.126.336	1.755.342.337	98,77	1	Paket	1	100,00	Tidak ada Kendala	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.059.120	37.059.120	28.585.000	77,13	4	Dokumen bahan bacaan	4	100,00	Tidak ada Kendala	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	229.468.800	229.468.800	226.699.892	98,79	12	Laporan	12	100,00	Tidak ada Kendala	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	258.533.160	258.533.160	244.677.535	94,64	12	Laporan	12	100,00	Tidak ada Kendala	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.330.279.435	2.330.279.435	2.215.002.078	95,05	100	%	100	100,00		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.330.279.435	2.330.279.435	2.215.002.078	95,05	50	unit	50	100,00	Tidak ada Kendala	



	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.883.452.814	2.883.452.814	2.863.532.136	99,31	100	%	100	100,00		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	66.911.580	66.911.580	58.524.676	87,47	12	Laporan	12	100,00	Tidak ada Kendala	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.846.731.334	1.846.731.334	1.845.463.021	99,93	12	Laporan	12	100,00	Tidak ada Kendala	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	969.809.900	969.809.900	959.544.439	98,94	4	Laporan	4	100,00	Tidak ada Kendala	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.806.941.200	2.806.941.200	2.708.716.489	96,50	100	%	100	100,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.544.515.200	1.544.515.200	1.511.095.973	97,84	69	Unit	69	100,00	Tidak ada Kendala	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	429.624.600	429.624.600	367.667.633	85,58	30	unit	30	100,00	Tidak ada Kendala	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	832.801.400	832.801.400	829.952.883	99,66	25	Gedung	25	100,00	Tidak ada Kendala	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.083.218.131.244	1.083.218.131.244	1.077.933.259.499	99,51	100	WTP		100,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.454.336.114	1.454.336.114	1.401.614.015	96,37	4		4	100,00		
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	344.312.885	344.312.885	294.538.381	85,54	2	Dokumen	2	100,00	Tidak ada Kendala	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.110.023.229	1.110.023.229	1.107.075.634	99,73	2	Pergub dan perkada	2	100,00	Tidak ada Kendala	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	700.765.311	700.765.311	674.686.779	96,28	22	SK	22	100,00		



Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	462.075.380	462.075.380	437.696.959	94,7 2	22	SK	22	100, 00	Tidak ada Kendala	
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	108.029.406	108.029.406	107.965.991	99,9 4	11	SK	11	100, 00	Tidak ada Kendala	
Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	130.660.525	130.660.525	129.023.829	98,7 5	36	ASN	36	100, 00	Tidak ada Kendala	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	949.586.394	949.586.394	940.048.717	99,0 0	100	%	100	100, 00		
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	237.465.525	237.465.525	237.314.541	99,9 4	12	Dokumen	12	100, 00	Tidak ada Kendala	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	253.050.678	253.050.678	247.811.687	97,9 3	12	Dokumen	12	100, 00	Tidak ada Kendala	
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	310.560.807	310.560.807	309.542.506	99,6 7	12	Dokumen	12	100, 00	Tidak ada Kendala	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	148.509.384	148.509.384	145.379.983	97,8 9	12	Dokumen	12	100, 00	Tidak ada Kendala	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	752.311.750	752.311.750	732.524.037	97,3 7	100	%	100	100, 00		



	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	100.069.760	100.069.760	99.862.189	99,7 9	12	Dokumen	12	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	203.596.279	203.596.279	203.073.015	99,7 4	2	Perda /Perkada	2	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	77.126.375	77.126.375	67.250.436	87,2 0	1	Dokumen	1	100, 00	Tidak ada Kendala	
									100, 00		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	291.172.042	291.172.042	290.051.397	99,6 2	10	Dokumen	10	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah1	80.347.294	80.347.294	72.287.000	89,9 7	1	Dokumen Kebijakan	1	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.079.000.037.570	1.079.000.037.570	1.073.823.578.466	99,5 2	100	%	100	100, 00		
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	175.700.000.000	175.700.000.000	172.102.990.000	97,9 5	12	Laporan	12	100, 00	Menunggu Pergub	



	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.313.015.449	3.313.015.449	1.733.566.345	52,3 3	4	Laporan	4	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	899.987.022.121	899.987.022.121	899.987.022.121	100, 00	4	Laporan	4	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	361.094.105	361.094.105	360.807.485	99,9 2	100	%	100	100, 00		
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	361.094.105	361.094.105	360.807.485	99,9 2	172	orang	172	100, 00	Tidak ada Kendala	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.094.945.706	3.094.945.706	2.626.552.793	84,8 7	84,6 2	Persen	97,34	115, 03		
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.094.945.706	3.094.945.706	2.626.552.793	84,8 7	79,5	%	79,5	100, 00		
	Penyusunan Standar Harga	349.817.350	349.817.350	338.931.738	96,8 9	2	Dokumen	2	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	760.614.878	760.614.878	429.062.827	56,4 1	12	Laporan	12	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.003.277.608	1.003.277.608	910.085.235	90,7 1	4	Laporan	4	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Penilaian Barang Milik Daerah	128.852.487	128.852.487	127.473.289	98,9 3	4	Laporan	4	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	536.397.187	536.397.187	505.157.316	94,1 8	12	Dokumen	12	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	315.986.196	315.986.196	315.842.388	99,9 5	12	orang	12	100, 00	Tidak ada Kendala	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	14.655.505.531	14.655.505.531	14.383.189.221	98,1 4	5,7	Persen	7,94	139, 30		



	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.655.505.531	14.655.505.531	14.383.189.221	98,1 4	5,25	%	5,25	100, 00		
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	491.753.008	491.753.008	490.848.649	99,8 2	4	Laporan	4	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5.271.027.328	5.271.027.328	5.134.665.108	97,4 1	12	Laporan	12	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2.997.314.997	2.997.314.997	2.996.097.136	99,9 6	12	Laporan	12	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Pelayanan dan Konsultasi pajak Daerah	289.910.309	289.910.309	277.698.174	95,7 9	12	Laporan	12	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	305.209.492	305.209.492	303.290.093	99,3 7	1	LHP	1	100, 00	Tidak ada Kendala	
						4	Laporan	4	100, 00		
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	344.217.030	344.217.030	340.651.208	98,9 6	12	Laporan	12	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah Kota Jambi	723.964.486	723.964.486	720.016.166	99,4 5	7	Sapras	7	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah Kab. Muaro Jambi	518.865.887	518.865.887	508.349.276	97,9 7	10	Sapras	10	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah Kab. Batanghari	433.737.920	433.737.920	431.853.828	99,5 7	3	Sapras	3	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	416.434.915	416.434.915	374.236.031	89,8 7	4	Sapras	4	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah Kab. Tanjung Jabung Timur	387.953.433	387.953.433	380.220.180	98,0 1	4	Sapras	4	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah Kab. Tebo	475.212.392	475.212.392	456.621.641	96,0 9	4	Sapras	4	100, 00	Tidak ada Kendala	



	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah Kab. Bungo	501.726.716	501.726.716	493.458.000	98,3 5	4	Sapras	4	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah Kab. Sarolangun	449.581.258	449.581.258	435.195.990	96,8 0	4	Sapras	4	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah Kab. Merangin	533.314.996	533.314.996	524.882.506	98,4 2	4	Sapras	4	100, 00	Tidak ada Kendala	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah Kab. Kerinci	515.281.364	515.281.364	515.105.235	99,9 7	4	Sapras	4	100, 00	Tidak ada Kendala	
JUMLAH TOTAL BELANJA		1.193.555.146.148	1.193.142.173.038	1.186.215.963.766							

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas , Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan daerah;
3. Membina dan memfasilitasi bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Melaksanakan kesekretariatan Badan;
5. Melaksanakan tugas di bidang pajak daerah, retribusi, bagi hasil dan pendapatan lain-lain, anggaran, akutansi, pembinaan APBD kabupaten/kota, Bendahara Umum Daerah (BUD), pengelolaan barang milik daerah dan sistem informasi keuangan daerah;
6. Memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
7. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah; dan
8. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi mempunyai kewenangan :

1. Perencanaan , meliputi segala usaha kegiatan untuk menyusun rencana, mengolah, mengevaluasi pelaksanaan tugas.
2. Pelaksanaan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah serta pemungutan Pendapatan Daerah ke Kas Daerah Provinsi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Pembinaan, meliputi segala kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja, perbaikan –perbaikan tata laksana dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta kepada aparatur pemerintah.
4. Pelaksanaan administrasi, meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang Tata Usaha Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan guna mendukung kinerja pemungutan.
5. Pelaksanaan koordinasi, meliputi segala usaha dan kegiatan dengan Instansi lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah serta upaya peningkatan Pendapatan daerah dan pengamanan barang milik daerah.
6. Pengawasan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penyusunan dan menetapkan pedoman bagi Daerah dalam sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, penetapan tata tarif, administrasi pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah.
8. Pelaksanaan pengkajian dalam rangka tata laksana pengelolaan keuangan yang baik serta dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.
9. Pemberian pertimbangan teknis kepada Gubernur dalam rangka penataan pengelolaan keuangan daerah serta realokasi Pendapatan Daerah kepada Kabupaten/Kota.
10. Pendataan, pembukuan, evaluasi dan pelaporan, penerimaan.
11. Pelaksanaan Manejemen Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel capaian indikator utama sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Capaian Indikator Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian kinerja
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Skor IKM	86	86,27%
		Predikat AKIP	BB	BB
2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	OPINI BPK	WTP	WTP
3	Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	79.56	92
4	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase Peningkatkan pendapatan asli daerah	5.25 %	11,29 %

Dalam pengukuran kinerja transparansi dan akutabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tahun 2023 akan digambarkan dengan perbandingan antara Target, realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 sampai tahun 2023 dengan tsebagai berikut :

Pengukuran tingkat capain kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indicator kinerja untuk tahun 2019 sampai dengan 2023 , dimana provinsi jambi tahun 2019 sampai dengan 2023 memperoleh Opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan perasentase 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai dengan sasaran strategis Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi yaitu meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Mempunyai Unit Pelaksana Teknis yang tugas dan kedudukannya melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat dibidang Pajak , Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi melalui UPTD PPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi terus melakukan Peningkatan Kualitas dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat karena pada hakekatnya tugas pokok pemerintah adalah memberikan Pelayanan pada Masyarakat, untuk mengetahui kualitas dalam pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat Jambi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melaksanakan Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik secara berkala melalui penyusunan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang digunakan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan dalam meningkatkan kualitas.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berisi data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara Kuantitatif dan Kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dengan membandingkan harapan dan kebutuhan.

Tahun 2023 dalam laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi melakukan survey dengan hasil mutu pelayanan berdasarkan Indeks sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Kategori Mutu Pelayanan

NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25, 00- 64,99	D	Tidak Baik
65,00- 76,60	C	Kurang
76,61- 88,30	B	Baik
88,31-100,00	A	Sangat Baik

Dari keseluruhan Kuisioner (300 Kuisioner) dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut, dari hasil pengolahan terhadap kuisioner yang telah terisi tersebut diperoleh hasil berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh hasil Skor **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): 87,60** dengan angka Indeks sebesar B, maka Kinerja Unit Pelayanan ini berada dalam Mutu Pelayanan B dengan Kategori Baik, Karena berada dalam nilai Interval Indeks Kepuasan Masyarakat: **76,61- 88,2330** Perolehan Penilaian tergambar dalam Tabel 2 :

Tabel 2. 5 Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	Persyaratan Pelayanan	4.273
2	Prosedur Pelayanan	4.241
3	Waktu Pelayanan	4.290
4	Biaya/Tarif	4.249
5	Produk/Hasil Pelayanan	4.254
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	4.237
7	Prilaku Petugas Pelayanan	4.234
8	Maklumat Pelayanan	4.245
9	Mekanisme Pengaduan Pelayanan	4.260

Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Sakip Tahun 2020-2022

No	KABUPATEN	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022
1	2	3	4	5
	PREDIKAT SAKIP	BB	BB	A

Dari target yang telah ditetapkan untuk predikat Sakip dari tahun 2020 sd 2022 dimana untuk tahun 2020 dan 2021 telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan yaitu BB sedangkan tahun 2022 capaian kinerja sakip melebihi dari target ditetapkan yaitu A.

Dalam pengukuran kinerja transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tahun 2023 akan digambarkan dengan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 sampai tahun 2023 dengan table sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Opini BPK Tahun 2020-2022

No	KABUPATEN	CAPAIAN KINERJA 2020	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022
1	2	3	4	5
	PROVINSI JAMBI	WTP	WTP	WTP

Pengukuran tingkat capain kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indicator kinerja untuk tahun 2020 dan 2022 , hasil perbandingan tersebut diperoleh opini dan persentase pencapaian target, berdasarkan table diatas indicator dicapai opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Provinsi Jambi dimana opini BPK Perwakilan Provinsi memperoleh Opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Jambi dengan perasentase 100% sesuai dengan target yang ditetapkan sesuai dengan sasaran strategis Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi yaitu Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Capaian Kinerja Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun 2023

Pengukuran tingkat capain kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi pengamanan barang daerah dimana target tahun 2022 sebesar 84,79 % telah teralisasi sebesar 97,13 %, sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai dengan sasaran strategis Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi yaitu Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan Barang Milik Daerah.

Capaian Kinerja Persentase Peningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2023 Pengukuran tingkat capain kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 dilakukan dengan cara



membandingkan antara target dengan realisasi pendapatan asli daerah dimana target tahun 2023 sebesar 5,7 % telah teralisasi sebesar 7,90 %, sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai dengan sasaran strategis Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 2. 8 IKM Tahun 2023

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PER UNSUR LAYANAN TAHUN 2023
PADA KANTOR PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (PPD) SE PROV. JAMBI TAHUN 2023

NO	KANTOR PPPD	UNSUR PELAYANAN									NRP TTB	IKM / UNIT	MUTU PELAY ANAN	KETERA NGAN
		U 1	U 2	U 3	U 4	U 5	U 6	U 7	U 8	U 9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	UNIT PELAYANAN BPKPD PROVINSI JAMBI	0,385	0,40 0	0,3 74	0,4 00	0,4 00	0,3 77	0,3 96	0,4 00	0,4 11	3,54 3	88,5 8	A	SANGAT BAIK
2	KOTA JAMBI	0,400	0,39 2	0,4 00	0,3 81	0,4 00	0,4 00	0,3 85	0,3 85	0,4 00	3,54 3	88,5 8	A	SANGAT BAIK
3	KABUPATEN MUARO JAMBI	0,389	0,38 1	0,3 92	0,4 00	0,3 89	0,3 95	0,3 81	0,3 85	0,3 81	3,49 3	87,3 3	B	BAIK
4	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	0,389	0,39 6	0,3 96	0,3 81	0,3 89	0,3 89	0,4 00	0,3 96	0,3 74	3,51 0	87,7 5	B	BAIK
5	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	0,381	0,38 5	0,3 92	0,4 00	0,3 89	0,3 85	0,3 85	0,3 81	0,3 89	3,48 7	87,1 8	B	BAIK
6	KABUPATEN BATANGHARI	0,400	0,38 1	0,4 00	0,3 89	0,3 92	0,3 85	0,3 96	0,3 85	0,3 96	3,52 4	88,1 0	B	BAIK



7	KABUPATEN TEBO	0,385	0,40 0	0,3 85	0,3 85	0,3 83	0,3 85	0,3 89	0,3 85	0,3 81	3,47 8	86,9 5	B	BAIK
8	KABUPATEN SAROLANGUN	0,389	0,39 2	0,3 85	0,3 85	0,3 85	0,3 81	0,3 85	0,3 92	0,3 81	3,47 5	86,8 8	B	BAIK
9	KABUPATEN MERANGIN	0,385	0,39 6	0,3 92	0,3 92	0,3 81	0,3 81	0,3 77	0,3 77	0,3 96	3,47 7	86,9 3	B	BAIK
10	KABUPATEN BUNGO	0,392	0,38 9	0,3 89	0,4 00	0,3 85	0,3 85	0,3 89	0,3 89	0,3 92	3,51 0	87,7 5	B	BAIK
11	KABUPATEN KERINCI	0,389	0,38 1	0,3 89	0,3 81	0,3 89	0,4 00	0,3 92	0,3 81	0,4 00	3,50 2	87,5 5	B	BAIK
	JUMLAH IKM PER CPPD	4,284	4,29 3	4,2 94	4,2 94	4,2 82	4,2 63	4,2 75	4,2 56	4,3 01	38,5 42	963, 550		
	IKM UNIT PELAYANAN BPKPD PROV. JAMBI											87,6 0	B	BAIK



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi

Semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintah Pusat yang bersih dan akuntabel serta Pemerintah Daerah yang tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan daya saing yang sehat antar daerah sehingga terwujud kesatuan bangsa baik di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, telah diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berupa sistem keuangan berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Dalam melaksanakan Tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Dewasa ini, kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan umumnya mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan sebagai berikut :



1. Kewenangan beberapa samsat di Kabupaten/Kota masih belum optimal karena beberapa samsat belum ditingkatkan menjadi samsat penuh
2. Kualitas dan kuantitas SDM masih harus ditingkatkan
3. Belum sempurnanya sistem aplikasi komputisasi samsat dan belum tersedianya aplikasi pendapatan
4. Daya beli masyarakat mengalami penurunan sehingga berdampak kepada penerimaan Pajak Daerah
5. Terbatasnya kewenangan Pemerintah Daerah terhadap pemungutan jenis pajak daerah dan retribusi daerah
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
7. Belum Tertibnya Surat Pertanggung Jawaban
8. Penyampaian Bukti Pembayaran Pajak Kurang tertib
9. Peraturan dalam penganggaran selalu berubah-ubah
10. Jaringan Koneksi tidak Stabil sehingga jalannya aplikasi terhambat
11. Sarana dan Prasarana belum dan tidak memadai sehingga suasana kerja tidak nyaman

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap kebijakan Nasional

Visi dan Misi Kepala Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam rangka menunjang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Pemerintah Provinsi Jambi melalui Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih telah merumuskan **Misi** dan **Misi** untuk membantu program kerja menuju suksesnya rencana strategis Provinsi Jambi menuju **JAMBI MANTAP**, adapun Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI JAMBI MANTAP

“ TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DI BAWAH RIDHO ALLAH SWT “

MISI JAMBI MANTAP

1. ***MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN***
2. ***MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN DAERAH***
3. ***MEMANTAPKAN KUALITAS SDM***

Visi dan Misi JAMBI MANTAP yang telah ditetapkan dan menjadi janji Politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dirumuskan untuk mencapai cita-cita yang bertujuan :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas
2. Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender

Berdasarkan Visi dan Misi diatas Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi sesuai Tugas dan Fungsi terus berupaya melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap peningkatan pendapatan daerah serta tata kelola keuangan sesuai koridor dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan dan menunjang hal tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi telah menetapkan Visi dan Misi yaitu

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi merumuskan adanya peningkatan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan untuk terciptanya kemandirian daerah serta pengelolaan keuangan secara tertib, untuk mewujudkan Provinsi Jambi yang tangguh, guna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan dapat terpenuhinya pembangunan Provinsi Jambi yang merata

una mempertegas arah kebijakan yang akan di ambil oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, maka ada beberapa langkah dalam menentukan rumusan yang mengaitkan antara permasalahan pembangunan daerah dengan isu-isu strategis yang telah di formulasikan sebelumnya, sehingga dari permasalahan yang ada akan ditemukan jawaban sebagai sebuah solusi untuk dijadikan pokok-pokok pemikiran dalam perwujudan demi tercapai nya cita-cita yang ada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

3.2 Tujuan dan sasaran

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memegang peranan penting dalam pembangunan serta sebagai ujung tombak dalam pembiayaan jalannya pembangunan di Provinsi Jambi dalam mengelola potensi-potensi yang akan menjadi sumber Pendapatan Daerah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk menjalankan hal tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi sesuai

tugas dan fungsinya mempunyai tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dengan tujuan yang akan dicapai antara lain :

- ❖ Meningkatkan tata Kelola pemerintahan daerah yang bersih, baik dan berwibawa
- ❖ Meningkatkan tata Kelola keuangan yang transparan
- ❖ Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah

Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- ❖ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- ❖ Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- ❖ Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan Barang Milik Daerah
- ❖ Meningkatnya pendapatan daerah

Tabel 3. 1 Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi							
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
			Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan tata Kelola pemerintahan daerah yang bersih, baik dan berwibawa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Skor IKM	86	87	88	89	90
		Predikat AKIP	BB	BB	A	A	A
Meningkatkan tata	Meningkatnya	OPINI BPK	WTP				



Kelola keuangan yang transparan dan akuntabel	transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah						
				WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	79,50 %	84,62 %	89,74 %	94,86 %	100
Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase Peningkatan pendapatan asli daerah	5,25	5,7	6,1	6,4	6,7

Tabel 3. 2 Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Rencana Program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi untuk 1 tahun yaitu Tahun Anggaran 2025 terdiri Program dan Kegiatan Pokok dan rutinitas perkantoran, Program dan Kegiatan Lintas Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan



Daerah Provinsi Jambi Jambi serta kegiatan pendukung lainnya dapat dilihat sebagai berikut

A. Program dan Kegiatan Pokok

I. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
- b. Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

3 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- c. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- d. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
- b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

5 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak



- c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi

6 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi

Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

- a. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang
Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi

II. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1 Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Penyusunan Standar Harga
- b. Inventarisasi Barang Milik Daerah
- c. Pengamanan Barang Milik Daerah
- d. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- e. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan
Kebijakan Pajak Daerah
- b. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- c. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak
Daerah
- d. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- e. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- f. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
- g. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kota Jambi
- h. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Muaro Jambi
- i. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Batanghari



- j. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- k. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- l. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tebo
- m. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Bungo
- n. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Sarolangun
- o. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Merangin
- p. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Kerinci

IV. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

B. Program dan Kegiatan Lintas Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi sebagai Koordinator Pendapatan Daerah serta Pengelolaan Keuangan Daerah telah melakukan langkah-langkah dalam meningkatkan Tata kelola keuangan serta pendapatan daerah

Adapun langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah adalah melalui Intensifikasi dan Eksentifikasi untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan serta melaksanakan koordinasi dengan dinas instansi dan mitra kerja, disamping itu juga dalam rangka peningkatan pendapatan daerah serta pengelolaan keuangan daerah diperlukan sarana dan prasarana, pelayanan publik, kualitas aparatur, dan peningkatan kualitas informasi

Intensifikasi dan Eksentifikasi Pendapatan Daerah

Langkah-langkah yang dilaksanakan melalui insentififikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah :

- a. Melakukan sosialisasi peraturan perpajakan dan menghimbau wajib pajak untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku melalui media elektronik, media cetak, baliho, brosur dan spanduk
- b. Melakukan pemuktahiran data wajib pajak, dan objek pajak
- c. Melaksanakan program pemutihan Pajak
- d. Melaksnakan Razia kendaraan bermotor secara simultan
- e. Mengoptimalisasikan pelayan-pelayanan pajak kendaraan bermotor antara lain :
 - Samsat LINK (online) di 11 UPTD PPD Kabupaten/Kota
 - Samsat Drive Thru
 - Pengoprasian Gerai Samsat
 - Pengoprasian samsat Keliling
 - Pengoprasian pos-pos pembantu samsat pada daerah jaraknya jauh

Langkah-langkah yang dilaksanakan melalui Eksentififikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah :

- Melakukan Raker/Rakor Tim Pembina samsat
- Melakukan koordinasi baik kePemerintah Pusat maupun ke Pemerinta Daerah yang telah berhasil dalam meningkatkan Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk pedoman penganggaran sejak tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jambi telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan PembangunanPembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil



Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program dan kegiatan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi yaitu :

I PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**
- 2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**
- 3 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**
- 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**
- 5 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
- 6 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**

II PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- 1 Pengelolaan Barang Milik Daerah**

III PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

- 1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

IV PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
- 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi dapat dilihat pada



Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Tahun Anggaran 2025

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tujuan 1	Sasaran 1		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN				2.071.36 3.060.24 4				2.437.62 1.152.52 5
1. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan daerah yang bersih , baik dan berwi bawa	1. Meningkatkan Kualit as Pelay anan Publik dan akunt abilita s kinerj a pemer intaha n		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PREDIKAT SAKIP		A	170.926. 169.092			A	187.094. 828.097
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Perencanaan, Pengang		11 Laporan	1.636.17 4.354			11 Laporan	1.799.79 1.790



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				garan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jambi	4 Dokumen	609.355.184	PAD		4 Dokumen	670.290.702
			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jambi	5 Laporan	673.837.971	PAD		5 Laporan	741.221.768



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jambi	2 Laporan	352.981.200			2 Laporan	388.279.320
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Periode Administrasi Perangkat Daerah		12 Bulan	137.298.793.400			12 Bulan	151.028.672.740
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Orang	Jambi	309 Orang	136.069.313.900	PAD		309 Orang	149.676.245.290



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lo	target	Rp			target	Rp
					ka						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Orang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Orang	Jambi	4 Dokumen	1.104.105.000	PAD		4 Dokumen	1.214.515.500
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jambi	1 Dokumen	125.374.500	PAD		1 Dokumen	137.911.950
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi Barang		100 %	1.588.468.337			100%	1.723.357.267



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lo	target	Rp			target	Rp
					ka	t					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Milik Daerah							
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Ja m bi	4 Doku men	146.410. 181	PAD		4 Dokum en	161.051. 199
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Ja m bi		551.624. 050	PAD			606.786. 455
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian	Ja m bi		171.696. 192	PAD			188.865. 811



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)							
					Rencana Tahun 2025				Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana		target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Barang Milik Daerah SKPD							
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jambi		239.579.837	PAD			263.537.821
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jambi		239.579.038	PAD			263.536.942



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lo	target	Rp			target	Rp
					ka						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				pada SKPD							
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jambi		239.579.038	PAD			239.579.038
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil daerah		100 %	1.790.966.000			100%	1.970.062.600
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jambi	45 Orang	451.980.000	PAD		50 Orang	497.178.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025			Sumber Dana		target	Rp
					Lokasi	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jambi	1 Paket	467.181.000	PAD		1 Paket	513.899.100
			Pemindahan Tugas Orang	Jumlah Orang yang Dipindahtugaskan	Jambi	10 Orang	106.480.000	PAD		10 Orang	117.128.000
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jambi	11 Unit	332.750.000	PAD		11 Unit	366.025.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jambi	4 Dokumen	199.650.000	PAD		4 Dokumen	219.615.000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Jambi	45 Orang	232.925.000	PAD		50 Orang	256.217.500
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian pelayanan		100 %	6.825.127.600			100%	7.507.640.360



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lo	target	Rp			target	Rp
					ka						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				administrasi umum							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jambi	1 Paket	340.256.900	PAD		1 Paket	374.282.590
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jambi	1 Paket	2.403.333.100	PAD		1 Paket	2.643.666.410
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	Jambi	1 Paket	1.133.222.100	PAD		1 Paket	1.246.544.310



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lo	target	Rp			target	Rp
					ka						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Kantor yang Disediakan							
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jambi	1 Paket	1.923.742.200	PAD		1 Paket	2.116.116.420
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jambi	4 Dokumen	195.882.300	PAD		4 Dokumen	215.470.530



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jambi	12 Laporan	211.708.900	PAD		12 Laporan	232.879.790
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jambi	12 Laporan	616.982.100	PAD		12 Laporan	678.680.310
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	11.004.033.100			100%	11.204.436.410
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan	Jambi	50 Unit	2.004.033.100			50 Unit	2.204.436.410



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				dan Mesin Lainnya yang Disediakan							
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jambi	20 Unit	4.500.000.000	PAD		20 Unit	4.500.000.000
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Jambi	20 Unit	4.500.000.000	PAD		20 Unit	4.500.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lo	target	Rp			target	Rp
					ka	t					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Disediakan							
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun	Jambi			PAD			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian jasa penunjang urusan perangkat daerah		100 %	14.044.602.300			100%	16.930.312.530
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jambi	12 Laporan	99.037.700	PAD		12 Laporan	108.941.470
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jambi	12 Laporan	1.920.564.600	PAD		12 Laporan	2.112.621.060



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025			Sumber Dana		target	Rp
					Lokasi	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jambi	12 Laporan	937.500.000	PAD		12 Laporan	945.000.000
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Muaro Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jambi	12 Laporan	750.000.000	PAD		12 Laporan	945.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Batanghari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jambi	12 Laporan	750.000.000	PAD		12 Laporan	945.000.000
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjab Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jambi	12 Laporan	750.000.000	PAD		12 Laporan	1.023.750.000
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjab Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunika	Jambi	12 Laporan	750.000.000	PAD		12 Laporan	1.023.750.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tebo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jambi	12 Laporan	812.500.000	PAD		12 Laporan	1.023.750.000
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Bungo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Jambi	12 Laporan	812.500.000	PAD		12 Laporan	1.023.750.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lo	target	Rp			target	Rp
					ka						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Disediakan							
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Sarolangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jambi	12 Laporan	812.500.000	PAD		12 Laporan	1.023.750.000
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Merangin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jambi	12 Laporan	812.500.000	PAD		12 Laporan	945.000.000
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Kerinci	Jumlah Laporan Penyediaan	Jambi	12 Laporan	812.500.000	PAD		12 Laporan	945.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				n Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jambi	4 Laporan	1.341.523.000	PAD		4 Laporan	1.475.675.300
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100 %	12.507.956.000			100%	14.572.587.600



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jambi	69 Unit	2.177.468.200	PAD		69 Unit	2.395.215.020
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kota Jambi (Roda Empat)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarka	Jambi	4 unit	170.650.000	PAD		4 unit	215.019.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				n Pajaknya							
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Muaro Jambi (Roda Empat)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jambi	3 unit	127.987.500	PAD		3 unit	161.264.250
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Batanghari (Roda Empat)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jambi	4 unit	170.650.000	PAD		4 unit	215.019.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya							
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjab Barat (Roda Empat)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jambi	3 unit	127.987.500	PAD		3 unit	161.264.250
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjab Timur (Roda Empat)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	Jambi	3 unit	127.987.500	PAD		3 unit	161.264.250



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya							
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tebo (Roda Empat)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jambi	4 unit	170.650.000	PAD		4 unit	215.019.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					target	Rp	Sumber Dana				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Bungo (Roda Empat)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jambi	4 unit	170.650.000	PAD		4 unit	215.019.000
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Sarolangun (Roda Empat)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarka	Jambi	3 unit	127.987.500	PAD		3 unit	161.264.250



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)							
					Rencana Tahun 2025				Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana		target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				n Pajaknya							
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Merangin (Roda Empat)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jambi	4 unit	170.650.000	PAD		4 unit	215.019.000
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Kerinci (Roda Empat)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jambi	4 unit	170.650.000	PAD		4 unit	215.019.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya							
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kota Jambi (Roda Dua)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jambi	2 unit	9.525.000	PAD		2 unit	12.001.500
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Muaro Jambi (Roda Dua)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	Jambi	6 unit	28.575.000	PAD		6 unit	36.004.500



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lo kasi	targe t	Rp			target	Rp
					(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarka n Pajaknya							
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Batanghari (Roda Dua)	Jumlah Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarka n Pajaknya	Ja m bi	5 unit	23.812.500	PAD		5 unit	30.003.750



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjab Barat (Roda Dua)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jambi	6 unit	28.575.000	PAD		6 unit	36.004.500
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjab Timur (Roda Dua)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarka	Jambi	3 unit	14.287.500	PAD		3 unit	18.002.250



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				n Pajaknya							
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tebo (Roda Dua)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jambi	4 unit	19.050.000	PAD		4 unit	24.003.000
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Bungo (Roda Dua)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jambi	6 unit	28.575.000	PAD		6 unit	36.004.500



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya							
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Sarolangun (Roda Dua)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jambi	5 unit	23.812.500	PAD		5 unit	30.003.750
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Merangin (Roda Dua)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	Jambi	6 unit	28.575.000	PAD		6 unit	36.004.500



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)							
					Rencana Tahun 2025				Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana		target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya							
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Kerinci (Roda Dua)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Paiaknya	Jambi	7 unit	33.337.500	PAD		7 unit	42.005.250



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jambi	100 Unit	2.177.468.200	PAD		100 Unit	2.395.215.020
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jambi	30 Unit	492.040.200	PAD		30 Unit	541.244.220
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kota Jambi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jambi	20 Unit	500.000.000	PAD		20 Unit	630.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lo	target	Rp			target	Rp
					ka						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Muaro Jambi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jambi	20 Unit	250.000.000	PAD		20 Unit	315.000.000
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Batanghari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jambi	20 Unit	250.000.000	PAD		20 Unit	315.000.000
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjab Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jambi	20 Unit	250.000.000	PAD		20 Unit	315.000.000
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjab Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jambi	20 Unit	250.000.000	PAD		20 Unit	315.000.000
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tebo	Jumlah Peralatan dan Mesin	Jambi	20 Unit	312.500.000	PAD		20 Unit	393.750.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Lainnya yang Dipelihara							
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Bungo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jambi	20 Unit	312.500.000	PAD		20 Unit	393.750.000
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Sarolangun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jambi	20 Unit	375.000.000	PAD		20 Unit	472.500.000
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Merangin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jambi	20 Unit	437.500.000	PAD		20 Unit	551.250.000
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Kerinci	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jambi	20 Unit	375.000.000	PAD		20 Unit	472.500.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jambi	25 Unit	2.574.504.400	PAD		25 Unit	2.831.954.840
Tujuan 2	Sasaran		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OPINI BPK		WTP	1.865.811.092.056			WTP	2.211.860.951.262
1. Meningkatkan tata Kelola keuangan yang transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu		2 Perda APBD dan 2 Perkada Penjabaran APBD	3.752.460.181			2 Perda APBD dan 2 Perkada Penjabaran APBD	4.127.706.199



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)							
					Rencana Tahun 2025				Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana		target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	daerah										
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jambi	2 Dokumen	36.040.033	PAD		2 Dokumen	39.644.036
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jambi	2 Perda APBD dan 2 Perkada Penjabaran APBD	2.217.814.368	PAD		2 Perda APBD dan 2 Perkada Penjabaran APBD Murni dan Perubahan	2.439.595.805



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)							
					Rencana Tahun 2025				Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana		target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						D Murni dan Perubahan					
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jambi	2 Dokumen	351.369.013	PAD		2 Dokumen	386.505.915
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jambi	2 Dokumen	417.633.717	PAD		2 Dokumen	459.397.089
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan	Jambi	2 Dokumen	427.517.200	PAD		2 Dokumen	470.268.920



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)							
					Rencana Tahun 2025				Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana		target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				aan Anggaran Belanja Daerah							
			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jambi	43 Orang	302.085.850	PAD		43 Orang	332.294.435
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD Kab/Kota yang disusun		11 SK	1.516.731.479			11 SK	1.668.404.627



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumb er Dana	Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lo ka si	targe t	Rp			target	Rp
					(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				tepat waktu							
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jambi	11 SK	417.633.717	PAD		11 SK	459.397.089
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jambi	11 SK	344.736.067	PAD		11 SK	379.209.673



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)							
					Rencana Tahun 2025				Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana		target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				n/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota							
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan	Jambi	11 SK	399.275.831	PAD		11 SK	439.203.414



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lo	target	Rp			target	Rp
					ka			Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
			Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	Jambi	36 Orang	355.085.865	PAD		36 Orang	390.594.452



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)							
					Rencana Tahun 2025				Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana		target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Keuangan Daerah Kabupaten/Kota							
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyelesaian administrasi Perbendaharaan Daerah		100 %	2.776.380.496			100%	3.054.018.545
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jambi	12 Dokumen	692.534.196	PAD		12 Dokumen	761.787.615
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan	Jambi	12 Dokumen	670.500.650	PAD		12 Dokumen	737.550.715



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penerbitan Anggaran Kas dan SPD							
			Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jambi	12 Dokumen	852.700.650	PAD		12 Dokumen	937.970.715
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan	Jambi	12 Dokumen	560.645.000	PAD		12 Dokumen	616.709.500



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)							
					Rencana Tahun 2025				Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana		target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				gan dan Dana Transfer Lainnya							
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian administrasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100 %	1.376.963.487			100%	1.514.659.836
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,Pembiayaan,Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban	Jambi	12 Dokumen	400.980.603	PAD		12 Dokumen	441.078.663



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumb er Dana	Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lo ka si	targe t	Rp			target	Rp
					(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban							
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jambi	1 Dokumen Perda dan 1 Dokumen Perkada	574.248.372	PAD		1 Dokumen Perda dan 1 Dokumen Perkada	631.673.210



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)							
					Rencana Tahun 2025				Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana		target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi							
			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jambi	1 Dokumen	151.499.116	PAD		1 Dokumen	166.649.028
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	Jambi	10 Dokumen	80.595.923	PAD		10 Dokumen	88.655.516



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah							
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jambi	1 Dokumen Kebijakan	169.639.472	PAD		1 Dokumen Kebijakan	186.603.419
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian		100 %	1.855.647.055.500			100%	2.200.680.511.050



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lo	target	Rp			target	Rp
					ka						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							
			Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jambi	1 Laporan	147.102.079	PAD		1 Laporan	161.812.287
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan	Jambi	12 Laporan	637.875.000.000	PAD		12 Laporan	861.131.250.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumb er Dana	Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lo ka si	targe t	Rp			target	Rp
					(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				aan dan Penyalura n Bantuan Keuangan							
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelola an Dana Darurat dan Mendesak	Ja m bi	4 Lapo ran	313.374. 716.702	PAD		4 Lapora n	344.712. 188.372
			Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelola an Dana Bagi Hasil Provinsi	Ja m bi	4 Lapo ran	904.250. 236.719	PAD		4 Lapora n	994.675. 260.391
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentas e Pengelola an Data dan Implemen tasi Sistem		100 %	741.500. 914			100%	815.651. 005



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lo	target	Rp			target	Rp
					ka	t					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jambi	172 Orang	741.500.914	PAD		172 Orang	815.651.005
	2. Meningkatkan kualitas penge		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah		94.86%	12.490.403.778			100%	14.316.438.318



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	lolaan Barang Milik Daerah										
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah		100 %	12.490.403.778			100%	14.316.438.318
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Jambi	1 Dokumen	708.696.727	PAD		1 Dokumen	815.001.237
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang	Jambi	1 Dokumen	874.296.727	PAD		1 Dokumen	1.005.441.237



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Milik Daerah							
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jambi	1 Dokumen	597.777.801	PAD		1 Dokumen	687.444.471
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jambi	1 Dokumen	460.296.727	PAD		1 Dokumen	529.341.237
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jambi	12 Laporan	1.205.496.727	PAD		12 Laporan	1.386.321.237
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	Jambi	12 Laporan	1.031.178.545	PAD		12 Laporan	1.185.855.327



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Barang Milik Daerah							
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jambi	4 Laporan	3.650.173.517	PAD		4 Laporan	4.150.173.517
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jambi	4 Laporan	479.542.812	PAD		4 Laporan	551.474.234
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil	Jambi	4 Laporan	516.302.687	PAD		4 Laporan	593.748.090



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lo	target	Rp			target	Rp
					ka						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah							
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jambi	12 Dokumen	892.710.911	PAD		12 Dokumen	1.026.617.548



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jambi	2 Laporan	460.296.727	PAD		2 Laporan	529.341.237
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Jambi	1 Laporan	874.296.727	PAD		1 Laporan	1.005.441.237
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang	Jambi	12 Orang	739.337.141	PAD		12 Orang	850.237.712



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							
Tujuan 3	Sasaran		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		6,40 %	22.135.395.318			6,70%	24.348.934.849
Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membayai pemb	Meningkatkan pendapatan daerah		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		6,40 %	22.135.395.318			6,70%	24.348.934.849



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
angunan daerah											
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jambi	4 Laporan	1.210.550.711	PAD		4 Laporan	1.331.605.782
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jambi	12 Laporan	7.655.806.328	PAD		12 Laporan	8.421.386.961



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jambi			PAD			
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kota Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jambi	7 Sarana dan Prasarana	794.658.826	PAD		7 Sarana dan Prasarana	850.902.357
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Muaro Jambi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jambi	10 Sarana dan Prasarana	484.908.335	PAD		10 Sarana dan Prasarana	541.151.866
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Batanghari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelola	Jambi	3 Sarana dan Pras	484.908.335	PAD		3 Sarana dan Prasarana	541.151.866



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				an Pajak Daerah		arana					
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjab Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelola an Pajak Daerah	Jambi	4 Sarana dan Pras arana	484.908.335	PAD		4 Sarana dan Pras arana	541.151.866
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjab Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelola an Pajak Daerah	Jambi	4 Sarana dan Pras arana	461.895.944	PAD		4 Sarana dan Pras arana	518.139.475
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tebo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelola an Pajak Daerah	Jambi	4 Sarana dan Pras arana	527.600.330	PAD		4 Sarana dan Pras arana	583.843.861
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Bungo	Jumlah Sarana dan Prasarana	Jambi	4 Sarana dan	606.463.398	PAD		4 Sarana dan	662.706.929



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)					Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Rencana Tahun 2025					target	Rp
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengelolaan Pajak Daerah		Prasarana				Prasarana	
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Sarolangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jambi	4 Sarana dan Prasarana	568.555.205	PAD		4 Sarana dan Prasarana	624.798.736
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Merangin	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jambi	4 Sarana dan Prasarana	605.227.189,71	PAD		4 Sarana dan Prasarana	661.470.721
			UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Kerinci	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jambi	4 Sarana dan Prasarana	605.227.189,71	PAD		4 Sarana dan Prasarana	661.470.721
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil	Jambi	12 Laporan	5.435.819.314	PAD		12 Laporan	5.979.401.245



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lo	target	Rp			target	Rp
					ka	t					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah							
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Jambi	12 Laporan	688.700.624	PAD		12 Laporan	757.570.686
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Jambi	1 LHP	682.048.344	PAD		1 LHP	750.253.178
				Jumlah Laporan Hasil Pengendal	Jambi	4 Laporan		PAD		4 Laporan	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)							
					Rencana Tahun 2025				Capaian Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	target	Rp	Sumber Dana		target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	"(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				ian dan Pengawasan Pajak Daerah							
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jambi	12 Laporan	838.116.910	PAD		12 Laporan	921.928.601

BAB V

PENUTUP

Pembangunan adalah perubahan yang bersifat dinamis (*a dynamic change*), Pembangunan bertujuan melaksanakan perubahan, tidak hanya terjadi pada sekelompok orang atau pada suatu wilayah saja, tetapi berlangsung dalam seluruh masyarakat (*a whole society*), seluruh wilayah, perubahan itu berlangsung secara bertahap, dari suatu keadaan yang belum baik menuju perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Pada hakekatnya, pembangunan yang paling utama adalah pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan prasarana dan sarana dilakukan hanya untuk menunjang kegiatan manusia dalam pembangunan. Pembangunan berlangsung selalu berubah. Dalam hal ini, pembangunan tidak hanya menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam masyarakat yang berubah itu, tetapi juga berperan untuk melakukan perubahan atau mengarahkan perubahan tersebut. Untuk itu, diperlukan instrumen dan strategi yang harus sesuai dengan kelompok sasaran (*target group*) dan strategi induk yang dipilih.

Karena pembangunan meliputi seluruh masyarakat, pembangunan mencakup berbagai sisi kehidupan maka diperlukan perencanaan yang baik dan berkesinambungan.

Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi. Rencana Kerja ini disusun sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2025. Selain itu, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi, dan juga jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana ini akan dijadikan pedoman bagi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan BPKPD Provinsi Jambi tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja BPKPD Provinsi Jambi tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan-karyawati Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi

Jambi, Januari 2024
KEPALA BADAN

AGUS PIRNGADI, S.sos
Pembina Utama Madya
Nip. 19691215 199003 1 005